



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018- 2023 dengan Baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan sasaran dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati Bangkalan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, administrasi dan organisasi serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuknya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan khususnya dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
SEKRETARIAT DAERAH
BANGKALAN
Ir. H. MOH. TAUFAN ZS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640610 199202 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	7
	2.2 Sumber Daya OPD.....	11
	2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	22
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	24
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	24
	3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	25
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH.....	29
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	29
BAB V	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH.....	34
	5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	37
	6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah.....	37

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	54
BAB VIII	PENUTUP.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan yang terkait dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor)
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

- a. menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini; dan

- b. menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disusun secara sistematika yang terbagi dalam tiap - tiap bab dan masing- masing bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

❖ Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

❖ Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan fungsinya.

❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan

- c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
 - e. Staf Ahli Bupati;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 311 orang dan, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) orang .

Jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan kantor dengan rincian sebagai berikut :'

Tabel 2.2.1

Daftar Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten	3
3.	Staf Ahli	3
4.	Kepala Bagian	10
5.	Kepala Sub Bagian	30
	Jumlah	47

Tabel 2.2.2

**Daftar Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan/Golongan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**

No.	JENIS DATA	PNS	JUMLAH
Pendidikan			
1.	Pasca Sarjana	22	22
2.	Sarjana	105	105
3.	D3	4	4
4.	SMA	55	55
5.	SMP	7	7
Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan			
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	6	6
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	6	6
4.	Pembina (IV/a)	8	8
5.	Penata Tk.I (III/d)	19	19
6.	Penata (III/c)	45	45
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	28	28
8.	Penata Muda (III/a)	26	26
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	12	12
10.	Pengatur (II/c)	16	16
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7	7
12.	Pengatur Muda (II/a)	13	13
13.	Juru Tk.I		
14.	Juru	4	4
15.	Juru Muda Tk.I	2	2
16.	Juru Muda		

Tabel 2.2.3

Daftar Pendidikan Kedinasan Struktural

Spama/Diklatpim III	10 Orang
Adum/Diklatpim IV	30 Orang

Tabel 2.2.4
Daftar Eselon / Jabatan

Eselon II	7 orang
Eselon III	10 orang
Eselon IV	30 orang

Untuk jabatan struktural sebanyak 47 jabatan terdiri dari 8 orang eselon IIb, 10 orang eselon III.a dan 30 orang eselon IV.a. Selain itu telah banyak pula yang mengikuti diklat penjurangan dan diklat teknis. Untuk lebih rinci dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.5
Daftar Perlengkapan

No	Nama Barang	j u m l a h
1	Gedung kantor	25
2	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	2
3	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	23
4	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	1
5	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2
6	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	1
7	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1
8	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	337
9	Mesin ketik	25
10	Mesin hitung	16
11	Mesin fotocopy	4
12	Mesin penghancur kertas	17
13	Tabung pemadam kebakaran	15
14	Peralatan kantor lainnya	34
15	Papan data / reklame dan peta	15
16	Almari	32

17	Brankas	46
18	Filling kabinet	56
19	Rak	18
20	Peralatan industri rumah tangga	57
21	Pigura/gambar presiden dan wapres/lambang garuda	57
22	Papan nama/papan tulis	55
23	Vacum cleaner	13
24	Air conditioner	211
25	Kipas angin	44
26	Televisi	43
27	Genset	5
28	Peralatan rumah tangga	1048
29	Mesin potong rumput	6
30	Komputer/PC	146
31	Komputer notebook	124
32	Printer	153
33	Scanner	8
34	Monitor/display	12
35	UPS/stabilizer	52
36	Peralatan jaringan komputer	30
37	Meja kerja	346
38	Meja rapat	44
39	Meja makan	59
40	Kursi kerja	1070
41	Kursi rapat	1889
42	Sofa / kursi tamu	75
43	Tabung gas	11
44	Kompore gas	17
45	Dispenser	35

46	Kulkas	18
47	Kamera	22
48	Handycam	2
49	LCD	31
50	Alat-alat studio lainnya	49
51	Telepon	1
52	Faximili	28
53	Radio HF/FM (handly talkie)	44
54	Alat-alat komunikasi lainnya	10
55	Karpet	10
56	Kompresor	1
57	Server	5

Ungkapan atas dasar Data Aset dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah , pilih Jenis Aset yang dominan penting.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.

Aspek pengelolaan pemerintahan selama kurun waktu Tahun 2018-2023 berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel 2.1 dan untuk anggaran realisasi pendanaan pelayanan disajikan dalam tabel 2.2.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan yang terkait dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor)
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2/D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut

- a. menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini; dan

- b. menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disusun secara sistematika yang terbagi dalam tiap - tiap bab dan masing- masing bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap sistematika penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

❖ Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

❖ Fungsi

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan fungsinya.

❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan

- c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
- 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
 - e. Staf Ahli Bupati;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Komposisi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 311 orang dan, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) orang .

Jumlah pegawai dilingkungan Sekretariat Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kegiatan kantor dengan rincian sebagai berikut :'

Tabel 2.2.1

Daftar Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten	3
3.	Staf Ahli	3
4.	Kepala Bagian	10
5.	Kepala Sub Bagian	30
	Jumlah	47

Tabel 2.2.2

**Daftar Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan/Golongan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan**

No.	JENIS DATA	PNS	JUMLAH
Pendidikan			
1.	Pasca Sarjana	22	22
2.	Sarjana	105	105
3.	D3	4	4
4.	SMA	55	55
5.	SMP	7	7
Komposisi PNS Menurut Pangkat/Golongan			
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	6	6
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	6	6
4.	Pembina (IV/a)	8	8
5.	Penata Tk.I (III/d)	19	19
6.	Penata (III/c)	45	45
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	28	28
8.	Penata Muda (III/a)	26	26
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	12	12
10.	Pengatur (II/c)	16	16
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	7	7
12.	Pengatur Muda (II/a)	13	13
13.	Juru Tk.I		
14.	Juru	4	4
15.	Juru Muda Tk.I	2	2
16.	Juru Muda		

Tabel 2.2.3

Daftar Pendidikan Kedinasan Struktural

Spama/Diklatpim III	10 Orang
Adum/Diklatpim IV	30 Orang

Tabel 2.2.4
Daftar Eselon / Jabatan

Eselon II	7 orang
Eselon III	10 orang
Eselon IV	30 orang

Untuk jabatan struktural sebanyak 47 jabatan terdiri dari 8 orang eselon IIb, 10 orang eselon III.a dan 30 orang eselon IV.a. Selain itu telah banyak pula yang mengikuti diklat penjurangan dan diklat teknis. Untuk lebih rinci dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.5
Daftar Perlengkapan

No	Nama Barang	jumlah
1	Gedung kantor	25
2	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan	2
3	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	23
4	Alat-alat angkutan darat bermotor bus	1
5	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2
6	Alat-alat angkutan darat bermotor truck	1
7	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1
8	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	337
9	Mesin ketik	25
10	Mesin hitung	16
11	Mesin fotocopy	4
12	Mesin penghancur kertas	17
13	Tabung pemadam kebakaran	15
14	Peralatan kantor lainnya	34
15	Papan data / reklame dan peta	15
16	Almari	32

17	Brankas	46
18	Filling kabinet	56
19	Rak	18
20	Peralatan industri rumah tangga	57
21	Pigura/gambar presiden dan wapres/lambang garuda	57
22	Papan nama/papan tulis	55
23	Vacum cleaner	13
24	Air conditioner	211
25	Kipas angin	44
26	Televisi	43
27	Genset	5
28	Peralatan rumah tangga	1048
29	Mesin potong rumput	6
30	Komputer/PC	146
31	Komputer notebook	124
32	Printer	153
33	Scanner	8
34	Monitor/display	12
35	UPS/stabilizer	52
36	Peralatan jaringan komputer	30
37	Meja kerja	346
38	Meja rapat	44
39	Meja makan	59
40	Kursi kerja	1070
41	Kursi rapat	1889
42	Sofa / kursi tamu	75
43	Tabung gas	11
44	Kompore gas	17
45	Dispenser	35

46	Kulkas	18
47	Kamera	22
48	Handycam	2
49	LCD	31
50	Alat-alat studio lainnya	49
51	Telepon	1
52	Faximili	28
53	Radio HF/FM (handly talkie)	44
54	Alat-alat komunikasi lainnya	10
55	Karpet	10
56	Kompresor	1
57	Server	5

Ungkapan atas dasar Data Aset dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah , pilih Jenis Aset yang dominan penting.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sekretariat Daerah memiliki tugas dan fungsi harus dapat memberikan layanan yang baik kepada pimpinan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.

Aspek pengelolaan pemerintahan selama kurun waktu Tahun 2018-2023 berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dengan pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel 2.1 dan untuk anggaran realisasi pendanaan pelayanan disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun (%)	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PERENCANAAN	Persentase Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan									
UMUM	Persentase Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan				78.50%	79.00%	86.40%	90.94%	110.06%	115.11%
ORGANISASI	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				60%	70%	60%	50.00%	100%	71%
	Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik				80%	80%	80%	80%	100%	100%
PROTOKOL	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan				75%	76%	93%	92%	124%	121%
TAPEM	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan				85%	85%	105%	108%	124	127

KESRA	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan				85%	85%	85%	26%	100	30
HUKUM	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan				85%	85%	105%	108%	124	127
PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti (%)				60	65	103.22	77.41	172.03	119.09
ADBANG	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev				85%	85%	79.89%	91.29%	93.99	107.40
BPBJ	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat Daerah									

Bangkalan, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Ir. H. MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196406101992021002

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
 Kabupaten Bangkalan

Uraian **)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIHIL								
Program Pelayanan Kesekretariatan	27,802,694,329.00	12,488,622,362.50	24,021,639,433.00	11,357,560,688.00	86.40	90.94	20,145,658,346	18,255,130,898
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	24,191,837,840.00	9,843,374,700.50	20,916,288,692.00	9,227,612,940.00	86.46	93.74	17,017,606,270	15,379,831,696
Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	2,193,979,139.00	1,636,372,012.00	1,973,975,641.00	1,176,712,348.00	89.97	71.91	1,915,175,576	1,805,173,827
Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	688,850,000.00	553,241,000.00	663,890,500.00	544,475,000.00	96.38	98.42	621,045,500	608,565,750
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	728,027,350.00	455,634,650.00	467,484,600.00	408,760,400.00	64.21	89.71	591,831,000	461,559,625
Program kelembagaan dan analisis jabatan, Ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta pengembangan kinerja	1,055,600,000	522,872,511	626,036,429	488,726,261				
Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan	261,000,000	150,085,164	144,494,800	146,285,164	55.36%	97.47%	-42.50%	1.24%

Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	365,600,000	151,259,502	122,515,000	146,912,002	33.51%	97.13%	-58.63%	19.91%
Kegiatan Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja	429,000,000	221,527,845	359,026,629	195,529,095	83.69%	88.26%	-48.36%	-45.54%
Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolanan dan kehumasan	1,163,900,000	1,163,900,000	210,146,650	930,701,098	18.06	79.96	1,163,900,000	687,023,325
Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	1,163,900,000	1,163,900,000	210,146,650	930,701,098	18.06	79.96	1,163,900,000	687,023,325
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,962,551,460	505,667,927	568,073,894	350,847,527	28.95	69.38	1,234,109,694	757,846,211
Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum	772,551,460	194,714,500	313,035,457	81,752,750	40.52	41.99	483,632,980	197,394,104
Fasilitasi Bina Kecamatan dan Kelurahan	185,000,000	44,750,307	66,545,438	41,489,207	35.97	92.71	114,875,154	54,017,323
Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	355,000,000	157,128,120	188,492,999	137,639,420	53.10	87.60	256,064,060	163,066,210
Program Pelayanan Kesekretariatan	650,000,000	109,075,000	596,771,000	89,966,150	91.81	82.48	379,537,500	343,368,575
Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional	650,000,000	109,075,000	596,771,000	89,966,150	91.81	82.48	379,537,500	343,368,575
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	2,025,000,000	1,976,900,000	1,870,036,200	657,480,000	92.35	33.26	2,000,950,000	1,923,468,100

Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	200,000,000	212,000,000	194,255,500	113,470,000	97.13	53.52	206,000,000	203,127,750
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan	1,675,000,000	1,605,900,000	1,613,811,300	534,710,000	96.35	33.30	1,640,450,000	1,609,855,650
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	150,000,000	159,000,000	61,969,400	9,300,000	41.31	5.85	154,500,000	110,484,700
Penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan pengkajian hukum	1,137,326,000	688,836,802	744,281,889	559,695,500	65.44	81.25	913,081,401	716,559,346
Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	370,000,000	189,471,350	210,146,650	189,471,350	56.80	100.00	279,735,675	199,809,000
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	480,000,000	339,440,102	306,545,750	211,043,000	63.86	62.17	409,720,051	322,992,926
Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum	287,326,000	159,925,350	227,589,489	159,181,150	79.21	99.53	223,625,675	193,757,420
Program Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah	975,000,000	436,998,000	918,132,647	430,223,400	94.17	98.45	705,999,000	677,565,324
Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan	125,000,000	57,665,600	116,224,050	54,170,600	92.98	93.94	91,332,800	86,944,825
Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah	600,000,000	236,130,400	558,588,193	233,183,300	93.10	98.75	418,065,200	397,359,297

Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan evaluasi bidang penanaman modal dan BUMD	250,000,000	143,202,000	243,320,404	142,869,500	97.33	99.77	196,601,000	193,261,202
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	60,000,000	188,412,049	44,724,000	173,883,750	74.54	92.29	124,206,025	116,568,025
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	60,000,000	188,412,049	44,724,000	173,883,750	74.54	92.29	124,206,025	116,568,025
Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	234,000,000	423,365,425	186,931,107	386,500,084	79.89	91.29	328,682,713	305,148,266
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	234,000,000	102,655,121	186,931,107	81,869,080	79.89	79.75	168,327,561	144,793,114
Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah	0	320,710,304	0	304,631,004	0.00	94.99	160,355,152	160,355,152
Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ		N I H I L						

Bangkalan, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Ir. H. MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196406101992021002

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah.

Upaya Reformasi Birokrasi hingga kini masih saja belum mencapai titik akhir, masih banyak yang perlu diatur, dilaksanakan dan dikendalikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan di setiap level pemerintahan mulai pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Sebagai pembuat regulasi di level Kabupaten fungsi Sekretariat Daerah sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Adapun beberapa kebijakan nasional yang perlu ditindak lanjuti melalui regulasi daerah, seperti kebijakan Reformasi Birokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penataan organisasi.

Selain berfungsi menjalankan fungsi penataan regulasi Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas Perangkat Daerah atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki kompetensi kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan di atas untuk diterapkan di daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah memiliki peluang sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berbasis IT;
2. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memadai;
3. Terlaksananya koordinasi yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan;
4. Penyediaan regulasi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan secara komprehensif;
5. Pembangunan gedung kantor yang representative;

Dengan demikian disamping peluang dalam proses pencapaian kinerja Sekretariat Daerah, tentunya ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, diantaranya menyangkut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;
3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;
4. Kurang optimalnya akses informasi hukum bagi masyarakat;
5. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Perwujudan good governance merupakan tuntutan dan harapan yang mesti dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah. Implementasi pencapaian good governance tersebut diperlukan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan aspiratif serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat menuntut setiap instansi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang dikeluarkan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, masih dijumpai beberapa hambatan berupa :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;
3. Kurangnya analisis dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan perencanaan selanjutnya;
4. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun visi dari Kabupaten Bangkalan adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dikemukakan diatas, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi;
3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah;
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.
- 6.

Berdasarkan misi Kabupaten Bangkalan tersebut di atas, Sekretariat Daerah mengemban tugas pada misi Ke-1 (satu) yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan misi ke-2 (dua), yaitu Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi. Untuk pencapaian misi yang pertama Sekretariat Daerah sebagai unsur pendukung terkait dengan Indikator Indeks Kesalehan Sosial.

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan.

Sasaran yang akan dituju oleh Sekretariat Daerah dalam melaksanakan misi tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintah daerah
2. Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah
3. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun Perubahan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dimaksud maka langkah-langkah untuk melakukan analisis juga menggunakan langkah-langkah dengan metode yang sama. Secara umum kebijakan, rencana dan program (KRP) yang terintegrasikan dalam matriks rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan penandanaan indikatif Tahun 2018 – 2023 tidak terdapat indikasi yang menyebabkan peluang kerusakan lingkungan skala makro maupun mikro. Karena kebijakan, rencana dan program (KRP) Perangkat Daerah yang direncanakan akan diselenggarakan Tahun 2018-2023. Pada Sekretariat Daerah hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi rutin untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan umum dan pelayanan lainnya ke masyarakat secara langsung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat bukan dinas yang bersentuhan langsung dengan RTRW tahun 2009-2029. Namun dalam pembuatan kebijakan harus memperhatikan kebijakan yang tertuang pada RTRW tahun 2009-2029, salah satunya kebijakan penetapan kawasan strategis. Kebijakan penetapan kawasan

strategis Kabupaten Bangkalan dilakukan pada kawasan yang memiliki Pengaruh besar terhadap tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan lain yang sejenis maupun tidak sejenis, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat strategi penataan dan kawasan strategi dilingkungan dengan :

1. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
2. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya;
4. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
5. Pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sesuai pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD, ada beberapa Perangkat Daerah yang bersentuhan langsung pada KLHS. Tetapi Sekretariat Daerah tidak langsung mengakomodir kebijakan yang ada pada KLHS. Kebutuhan Sekretariat Daerah terhadap KLHS hanya pada memperhatikan KLHS pada lingkup kegiatan pelaksanaan, untuk program tidak ada yang langsung terkait KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

❖ Faktor Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara rinci isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan;
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral;

3. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan;
4. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan utamanya ketegasan dan komitmen pimpinan.

❖ **Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Sekretariat dan Perangkat Daerah lainnya;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan :

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah:

***“Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bangkalan”***

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten Bangkalan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Sekretariat Daerah memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat daerah. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan:

❖ Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah kabupaten bangkalan

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran.

❖ Sasaran

1. Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan;

Dengan program pendukung :

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan

Dengan program pendukung :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dijelaskan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah								Sasaran Perangkat Daerah							
Uraian	Indikator	Realisasi		Target				Uraian	Indikator	Realisasi		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024			2019	2020	2021	2022	2023	Transisi 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan							
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan									Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%

									an						
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	NA	NA	ST	ST	ST	ST		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	-	-	-	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B (61,25)	B (63,15)	B (65,25)	B (68,50)	B (70,23)	B (71,23)		Persentase capaian IKU OPD dengan kategori minimal baik	84.38%	59.38%	86%	88%	90%	90%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	80,75	83.92	82.50	82.60	82.70	82.70		Persentase OPD dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kategori Baik	80%	80%	81%	82%	83%	83%
Meningkatnya ketertarikan, ketertiban dan perlindungan terhadap	Persentase pelanggaran terhadap ketertarikan, ketertiban dan perlindungan masyarakat/perda yang terselesaikan	60%	65%	70%	80%	85%									

masyara kat															
								Terpenuhi ya pelayanan kesekretari atan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretari atan	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	80.50

Bangkalan, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Ir. H. MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196406101992021002

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 5.1. Tujuan ,Sasaran ,Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun arah kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Sekretriati Daerah

Isu Strategis:
1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, terutama dari segi kualitas dan disiplin yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan
2. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan baik secara intern dinas maupun ekstern lintas sektoral
3. Sering terjadinya perubahan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan atau yang dikenal dengan reformasi bidang keuangan, sebagai akibat dari perkembangan dinamika yang terjadi pada sistem pemerintahan
4. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan utamanya ketegasan dan komitmen pimpinan
Visi : <i>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL</i>
Misi
Misi Ke-1 : Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Berkualitas
Misi Ke-2 : Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
Misi Ke-3 : Mewujudkan Rasa Aman dan Adil Pada Masyarakat
Tujuan
Tujuan 1 : <i>Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat</i>
Tujuan 2 : <i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan</i>
Tujuan 3 : <i>Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat</i>
Sasaran : <i>Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan</i>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	1. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1. penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan Pemerintah Daerah
Tujuan 2 Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat		2. memfasilitasi pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2. menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Tujuan 3 Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat		3. memfasilitasi penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan	3. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	4. fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan	4. Memberikan pelayanan yg optimal di internal perangkat daerah;

Bangkalan, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Ir. H. MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196406101992021002

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan yang saling sinergis untuk mendukung pencapaian keberhasilan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan pada tabel berikut :

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dan Pendanaan Sekretariat Daerah

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 11. Kegiatan Penataan Organisasi
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - a. Sub Kegiatan Penataan administrasi pemerintahan
 - b. Sub kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan
 - c. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
 - 2. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - c. Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- C. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan distribusi perekonomian
 - c. Sub Kegiatan Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
2. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Dapat dilihat pada Tabel 6.1 sedangkan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan tersaji pada Tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2019		2020			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NIHIL																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	0.00.5.01.01.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan		78.50%	27,802,694,329.00	79.00%	12,488,622,362.50	100%	24,021,639,433	108%	11,357,560,688.00	Bagian Umum Setda	Bangkalan
			0.00.5.01.01.16.01	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				24,191,837,840.00		9,843,374,700.50		20,916,288,692		9,227,612,940.00		Bangkalan
					Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis		11 Jenis			Bangkalan
					Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia		24 Jenis		24 Jenis		24 Jenis		24 Jenis			Bangkalan
			0.00.5.01.01.16.02	Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah				2,193,979,139.00		1,636,372,012.00		1,973,975,641		1,176,712,348.00		Bangkalan
					Jumlah perjalanan dinas dalam		31 Kali		14 Kali		31 Kali		14 Kali			Bangkalan

					daerah yang dilaksanakan			170 Kali		131 Kali		170 Kali		131 Kali			
			0.00.5.01.01.16.06	Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan		688,850,000.00		553,241,000.00		663,890,500		544,475,000.00				Bangkalan
					Jumlah pakaian Aparatur dan kelengkapan yang diadakan		1.239 Buah		700 Buah		1.239 Buah		700 Buah				Bangkalan
			0.00.5.01.01.16.07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur			728,027,350		455,634,650.00		467,484,600		408,760,400.00				Bangkalan
					Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar		50 Orang		71 Orang		50 Orang		71 Orang				Bangkalan
					Fasilitasi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia		-		1 Kegiatan		-		1 Kegiatan				Bangkalan
Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Sasaran 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	05.01.01.34	Program Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan Kinerja	Persentase OPD yang mengumpulkan laporan kinerja (LAKIP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	51%	60%		70%		60%	626,036,429	50%	488,726,261		Bag. Organisasi	Kab. Bangkalan
			05.01.01.34.1	Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan			261,000,000		426,659,999		144,494,800		146,285,164				
					jumlah peraturan ttg anjab dan ABK yg disusun		-		1 Dokumen		150,000,000		-		1 Dokumen		

					jumlah dokumen hasil monev kelembagaan perangkat daerah yang disusun		1 Dokumen	67,687,250	1 Dokumen	71,748,484	1 Dokumen		1 Dokumen		
					jumlah rancangan perkara tentang perangkat daerah		8 Peraturan	62,872,750	8 Peraturan	66,645,115	8 Peraturan		8 Peraturan		
					jumlah peserta sosialisasi		61 Peserta	84,000,000	61 Peserta	89,040,000	61 Peserta		61 Peserta		
					jumlah kebijakan pedoman kerja yang disusun		1 Peraturan	46,440,000	1 Peraturan	49,226,400	1 Peraturan		1 Peraturan		
		05.01.01.34.2		Kegiatan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			365,600,000		366,235,201		122,515,000		146,912,002		
					jumlah dokumen tata naskah dinas yang disusun		1 Dokumen	121,487,000	1 Dokumen	53,776,220	1 Dokumen		1 Dokumen		
					jumlah dokumen penyempurnaan dan pelaporan pelaksanaan SOP daerah yang disusun		1 Dokumen	77,497,500	1 Dokumen	82,147,350	1 Dokumen		1 Dokumen		

					jumlah dokumen monev atas hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	61,382,500	1 Dokumen	65,065,450	1 Dokumen	1 Dokumen			
					jumlah UPP yang mengikuti kompetisi	1 Unit Pelayanan	58,613,000	1 Unit Pelayanan	62,129,780	1 Unit Pelayanan	1 Unit Pelayanan			
					jumlah laporan SPM yang disusun	1 Dokumen	46,620,000	1 Dokumen	49,417,200	1 Dokumen	1 Dokumen			
					jumlah peserta sosialisasi	-	-	90 Peserta	53,699,201	-	90 Peserta			
			05.01.01.34.3	Kegiatan Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja			429,000,000		454,740,000		359,026,629		195,529,095	
					jumlah dokumen LKJiP Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	275,859,600	1 Dokumen	292,411,176	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
					jumlah dokumen perjanjian kinerja yang disusun	1 Dokumen	7,566,000	1 Dokumen	8,019,960	1 Dokumen	-	1 Dokumen		
					Jumlah Peserta Sosialisasi	83 orang	44,974,400	83 orang	47,672,864	83 orang	-	83 orang		
					jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100,600,000	-	-	1 Dokumen	-	-		

					Jumlah Peserta yang dilakukan Monev Road Map Reformasi Birokrasi		-	-	61 peserta	106,636,000	-	-	61 peserta			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Terpenuhinya layanan kesekretariatan	Persentase pelayanan kepala daerah yang difasilitasi	5.01.01	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan kehumasan	Indeks Kepuasan KDH ,WKDH Dan Sekretaris Daerah		1	1,253,900,000	76%	1,040,071,098	94%	1,088,199,023	84%	862,863,098	Bagian Humas dan Protokol	Bangkalan
			01.01.35.01	Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah				150,000,000		150,000,000		142,351,700		28,405,000		Bangkalan
					persentase informasi kegiatan Pimpinan yang difasilitasi		100%		100%		95%		70%			Bangkalan
			01.01.35.02	Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah				480,000,000		612,964,600		374,775,000		586,869,000		Bangkalan
					persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan		100%		100%		96%		95%			Bangkalan
			01.01.35.03	Koordinasi Keprotokolan, Bupati, Wakil Bupati dan				623,900,000		277,106,498		571,072,323		247,589,098		Bangkalan

				Sekretaris Daerah												
					persentase kegiatan pimpinan yang di fasilitasi protokoler		100%		100%		91%		89%			Bangkalan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan		Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah		85.00%	1,312,551,460	85%	396,592,927	105%	568,073,894	108%	260,881,377	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bangkalan
				Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum				772,551,460		194,714,500		313,035,457		81,752,750		Bangkalan
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum		5 DOK		5 DOK		5 DOK		5 DOK			Bangkalan
					Jumlah Kecamatan/Desa yang difasilitasi batas Daerah		1 DOK		1 DOK		1 DOK		1 DOK			Bangkalan
					Jumlah Laporan SPM yang disusun											Bangkalan
				Fasilitasi Bina Kecamatan dan Kelurahan			35 KEG	185,000,000	35 KEG	44,750,307	35 KEG	66,545,438	35 KEG	41,489,207		Bangkalan
					Persentase Kecamatan yang difasilitasi dalam pembinaan Kecamatan dan Kelurahan		100%		100%		100%		100%			Bangkalan
					Persentase Dokumen Profil Kecamatan yang disusun		100%		100%		100%		100%			Bangkalan
				Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi				355,000,000		157,128,120		188,492,999		137,639,420		Bangkalan

				Daerah	Persentase Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi		100%		100%		100%		100%			Bangkalan
				Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan Internal pelayanan Kesekretariatan		650,000,000		109,075,000		596,771,000		89,966,150			
				Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional	jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi		4 Keg		3 Keg							Bangkalan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	5,01,01,29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan		85%	2,025,000,000	85%	1,976,900,000	87%	800,486,389	108%	559,695,500	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangkalan
			5,01,01,29,1	Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial				200,000,000		212,000,000		210,146,650		189,471,350		Bangkalan
					Jumlah Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial		24 Kali		24 Kali		24 Kali					Bangkalan
					Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan		75 Orang		75 Orang		75 Orang	56,204,500				Bangkalan
					Jumlah Kehadiran Peserta Hotmil Qur'an		200 Orang		200 Orang		200 Orang					Bangkalan
					Jumlah Kehadiran Peserta Pengajian Rutin		150 Orang		150 Orang		150 Orang		450 orang			Bangkalan
					Jumlah Peserta Nisfu Sya'ban		200 Orang		200 Orang		200 Orang					Bangkalan

			5,01,01,29,2	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan	Jumlah Penerima Insentif Takmir Masjid		1,675,000,000		1,605,900,000		306,545,750		211,043,000		Bangkalan
					Jumlah Peserta MTQ yang diseleksi dan dibina	50 Orang		50 Orang		50 Orang					Bangkalan
					Jumlah Peserta Sosialisasi Hibah Bansos	75 orang		75 orang		75 Orang		7 orang			Bangkalan
					Persentase terlaksananya Kegiatan di Bulan Ramadhan	100%		100%		100%					Bangkalan
					jumlah kegiatan peringatan hari besar islam	6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 Kegiatan		6 kegiatan			
					Jumlah Peserta yang di seleksi (POSPENDA)	50 Orang		50 Orang		50 Orang					
					jumlah kegiatan pelayanan kebersihan masjid agung	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan					
					jumlah kegiatan rangkaian hari santri nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 kegiatan			
					Jumlah Peserta Pemantauan Rukyatul Hilal	100 Orang		100 Orang		100 Orang					
					Persentase terlaksananya Kegiatan zikir dan sholawat	100%		100%		100%		20%			
			5,01,01,29,3	Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Pemuda			150,000,000		159,000,000		227,589,489		159,181,150		Bangkalan

				an	Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Monev		24 Kali		24 kali			1 kali			Bangkalan
					Jumlah Peserta Sosialisasi		75 Orang				75 Orang				Bangkalan
					Jumlah Peserta yang Dibina		50 Orang		150 orang		50 Orang				Bangkalan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	5.01.5.01.01.30.	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan pengkajian hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan		85.00%	1,137,326,000	85%	688,836,802	105%	744,281,889	108%	559,695,500	Bagian Hukum	Bangkalan
			5.01.5.01.01.30.01.	Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				370,000,000		189,471,350		210,146,650		189,471,350		Bangkalan
					Jumlah Peraturan Daerah yang disusun		7 Peraturan Daerah		7 Peraturan Daerah		13 Peraturan Daerah		14 Peraturan Daerah			Bangkalan
					Jumlah Peraturan Bupati yang disusun		100 Peraturan Bupati		100 Peraturan Bupati		76 Peraturan Bupati		98 Peraturan Bupati			Bangkalan
					Jumlah Keputusan Bupati yang disusun		200 Keputusan Bupati		200 Keputusan Bupati		376 keputusan Bupati		311 keputusan Bupati			Bangkalan
																Bangkalan
																Bangkalan
			5.01.5.01.01.30.02.	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum				480,000,000		339,440,102		306,545,750		211,043,000		Bangkalan
					Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi		20 Kasus		20 Kasus		3 kasus		3 kasus			Bangkalan

			5.01.5.01.01.31.02	Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan pengembangan produk daerah	Jumlah fasilitasi bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah yang dilakukan		7 kali	500,000,000	7 kali	525,000,000	8 kali	558,588,193	4 kali	233,183,300		Kabupaten Bangkalan
			5.01.5.01.01.31.03	Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan evaluasi bidang penanaman modal dan BUMD	Jumlah fasilitasi bidang penanaman modal dan BUMD yang dilakukan		11 kali	300,000,000	11 kali	315,000,000	11 kali	243,320,404	11 kali	142,869,500		Kabupaten Bangkalan
			0.00.5.01.01.13	Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi ketentuan di bidang cukai		100%	60,000,000	100%	62,700,000	100%	44,724,000	100%	173,883,750		
			0.00.5.01.01.13.02	Kegiatan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah perangkat daerah yang dipantau sesuai ketentuan bidang cukai		7 PD	60,000,000	7 PD	62,700,000	7 PD	44,724,000	7 PD	173,883,750		Kabupaten Bangkalan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	5.01.5.01.01.32.	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev		85.00%	234,000,000	85.00%	423,365,425	79.89%	186,931,107	91.29%	386,500,084	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
			5.01.5.01.01.32.01	Pengendalian				234,000,000		102,655,121		186,931,107		81,869,080		Bangkalan

				Pembangunan Daerah															
					jumlah laporan monitoring kegiatan fisik konstruksi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen						Bangkalan
					Persentase Fasilitas Pelaksanaan Rakor PD Lingkup Asisten II		100%		100%		100%		100%						Bangkalan
			5.01.5.01.01.32.02	Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah			0		320,710,304		0		304,631,004					Bangkalan	
					Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/Semesteran)		0		18 Laporan		0		18 Laporan					Bangkalan	
					Laporan Pengawasan Evaluasi Realisasi Anggaran		0		12 Laporan		0		12 Laporan					Bangkalan	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pekelangan PBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ			N O H I L										Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Bangkalan
			4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi														

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah*)
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output) (Tahun 2020)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PERENCANAAN																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		79,50 %	19.917.629.146	80,00 %	21.909.392.061	80,50 %	24.100.331.267	80,50 %	65.927.352.473	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		79,50 %	206.051.250	80,00 %	226.656.375	80,50 %	249.322.013	80,50 %	682.029.638	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan

			4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		3 Dokumen	40.286.900	3 Dokumen	44.315.590	3 Dokumen	48.747.149	9 Dokumen	133.349.639	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	14.884.200	1 Dokumen	16.372.620	1 Dokumen	18.009.882	3 Dokumen	49.266.702	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	14.884.200	1 Dokumen	16.372.620	1 Dokumen	18.009.882	3 Dokumen	49.266.702	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	14.884.200	1 Dokumen	16.372.620	1 Dokumen	18.009.882	3 Dokumen	49.266.702	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun		1 Dokumen	14.884.200	1 Dokumen	16.372.620	1 Dokumen	18.009.882	3 Dokumen	49.266.702	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		2 Dokumen	51.401.900	2 Dokumen	56.542.090	2 Dokumen	62.196.299	6 Dokumen	170.140.289	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		9 Laporan	54.825.650	9 Laporan	60.308.215	9 Laporan	66.339.037	27 Laporan	181.472.902	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang		79,50 %	19.711.577.896	80,00 %	21.682.735.686	80,50 %	23.851.009.254	80,50 %	65.245.322.836	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan

				t Daerah	terpenuhi									n	
			4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	19.433.732.966	12 Bulan	21.377.106.263	12 Bulan	23.514.816.889	36 Bulan	64.325.656.117	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	4.755.000	12 Bulan	5.230.500	12 Bulan	5.753.550	36 Bulan	15.739.050	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi Akuntansi SKPD yang tersusun	4 Kali	208.455.000	4 Kali	229.300.500	4 Kali	252.230.550	12 Kali	689.986.050	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	24.454.000	1 Dokumen	26.899.400	1 Dokumen	29.589.340	3 Dokumen	80.942.740	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan
			4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	12 Bulan	40.180.930	12 Bulan	44.199.023	12 Bulan	48.618.925	36 Bulan	132.998.878	Bag. Perencanaan dan Keuangan	Bangkalan

UMUM

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	79,50 %	25.976.974.820	80,00 %	28.574.672.302	80,50 %	31.432.139.532	80,50 %	85.983.786.654	Bagian Umum	Bangkalan
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-------------	-----------

			4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100,00 %	163.785.000	100,00 %	180.163.500	100,00 %	198.179.850	100%	542.128.350	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun		2 Dokumen	4.755.000	2 Dokumen	5.230.500	2 Dokumen	5.753.550	6 Dokumen	15.739.050	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah		1 kali	149.520.000	1 kali	164.472.000	1 kali	180.919.200	3 kali	494.911.200	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Dokumen	4.755.000	4 Dokumen	5.230.500	4 Dokumen	5.753.550	12 Dokumen	15.739.050	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Dokumen	4.755.000	1 Dokumen	5.230.500	1 Dokumen	5.753.550	3 Dokumen	15.739.050	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat		100,00 %	637.533.800	100%	701.287.180	100,00 %	771.415.898	100%	2.110.236.878	Bagian Umum	Bang kalan

				Perangka t Daerah	Daerah yang terlaksana											
			4.01.01. 2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaa n Pakaia n Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Pengadaa n Pakaia n Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya		405 Stel	434.695.800	405 Stel	478.165.380	405 Stel	525.981.918	1215 Stel	1.438.843.098	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.05.11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundan g- Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		50 Orang	202.838.000	50 Orang	223.121.800	50 Orang	245.433.980	150 Orang	671.393.780	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.06	Kegiatan Administra si Umum Perangka t Daerah	Persentase Penyediaan Administra si Umum Perangkat Daerah		100%	2.502.039.790	100%	2.752.243.769	100%	3.027.468.146	100%	8.281.751.705	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.06.01	Sub kegiatan Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor		1 Jenis	125.772.550	1 Jenis	138.349.805	1 Jenis	152.184.786	3 Jenis	416.307.141	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.06.02	Sub kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor		4 Jenis	370.939.100	4 Jenis	408.033.010	4 Jenis	448.836.311	12 Jenis	1.227.808.421	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.06.04	Sub kegiatan Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3 Jenis	472.099.000	3 Jenis	519.308.900	3 Jenis	571.239.790	9 Jenis	1.562.647.690	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01. 2.06.05	Sub kegiatan Penyediaa n Barang	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan		2 Jenis	231.011.400	2 Jenis	254.112.540	2 Jenis	279.523.794	6 Jenis	764.647.734	Bagian Umum	Bang kalan

				Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan											
			4.01.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jenis	69.540.000	1 Jenis	76.494.000	1 Jenis	84.143.400	3 Jenis	230.177.400	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		431 Kali	1.232.677.740	431 Kali	1.355.945.514	431 Kali	1.491.540.065	1293 Kali	4.080.163.319	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	2.881.571.875	100%	3.169.729.063	100%	3.486.701.969	100%	9.538.002.906	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		6 Unit	403.087.300	6 Unit	443.396.030	6 Unit	487.735.633	24 Unit	1.334.218.963	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.07.05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		4 Jenis	196.006.200	4 Jenis	215.606.820	4 Jenis	237.167.502	12 Jenis	648.780.522	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.07.10	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		10 Jenis	2.282.478.375	10 Jenis	2.510.726.213	10 Jenis	2.761.798.834	30 Jenis	7.555.003.421	Bagian Umum	Bangkalan

			4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	7.970.304.260	100%	8.767.334.686	100,00 %	9.644.068.155	100%	26.381.707.101	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	28.720.000	1 Jenis	31.592.000	1 Jenis	34.751.200	3 Jenis	95.063.200	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	1.257.456.260	4 Jenis	1.383.201.886	4 Jenis	1.521.522.075	12 Jenis	4.162.180.221	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	1.700.304.000	3 Jenis	1.870.334.400	3 Jenis	2.057.367.840	9 Jenis	5.628.006.240	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	4.983.824.000	7 Jenis	5.482.206.400	7 Jenis	6.030.427.040	21 Jenis	16.496.457.440	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	4.129.015.930	100%	4.541.917.523	100%	4.996.109.275	100%	13.667.042.728	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2 Jenis	187.029.800	2 Jenis	205.732.780	2 Jenis	226.306.058	6 Jenis	619.068.638	Bagian Umum	Bang kalan

				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang disediakan											
			4.01.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		2 Jenis	1.654.769.330	2 Jenis	1.820.246.263	2 Jenis	2.002.270.889	6 Jenis	5.477.286.482	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.09.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Jenis	1.197.590.000	1 Jenis	1.317.349.000	1 Jenis	1.449.083.900	3 Jenis	3.964.022.900	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		20 Jenis	1.089.626.800	20 Jenis	1.198.589.480	20 Jenis	1.318.448.428	60 Jenis	3.606.664.708	Bagian Umum	Bang kalan
			4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi		100,00 %	1.104.201.650	100%	1.214.621.815	100,00 %	1.336.083.997	100%	3.654.907.462	Bagian Umum	Bang kalan

			4.01.01.2.11.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		12 Bulan	318.948.930	12 Bulan	350.843.823	12 Bulan	385.928.205	36 Bulan	1.055.720.958	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.11.02	Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		4 Jenis	100.000.000	4 Jenis	110.000.000	4 Jenis	121.000.000	12 Jenis	331.000.000	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.11.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan		1 Kali	85.252.720	1 Kali	93.777.992	1 Kali	103.155.791	3 Kali	282.186.503	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.11.04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	660.000.000	12 Bulan	726.000.000	36 Bulan	1.986.000.000	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi		100,00 %	6.588.522.515	100,00 %	7.247.374.767	100,00 %	7.972.112.243	100,00 %	21.808.009.525	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan		10 Jenis	4.177.240.525	10 Jenis	4.594.964.578	10 Jenis	5.054.461.035	30 Jenis	13.826.666.138	Bagian Umum	Bangkalan

				Daerah												
			4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan		10 Jenis	1.103.460.250	10 Jenis	1.213.806.275	10 Jenis	1.335.186.903	30 Jenis	3.652.453.428	Bagian Umum	Bangkalan
			4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan		5 Jenis	1.307.821.740	5 Jenis	1.438.603.914	5 Jenis	1.582.464.305	15 Jenis	4.328.889.959	Bagian Umum	Bangkalan

ORGANISASI

Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perangkat Daerah yang mengumpulkan Laporan Kinerja secara tepat waktu	50,00 %	50,00 %	1.246.226.820	50,00 %	1.308.704.258	55,00 %	1.358.228.991	55,00 %	3.913.160.069	Bagian Organisasi	Bangkalan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan		Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Pembangunan			Prosentase Perangkat Daerah dengan Nilai SKM berkategori Baik	80,00 %	81,00 %		82,00 %		83,00 %		83,00 %		Bagian Organisasi	Bangkalan

		Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	-	100,00 %	1.246.226.820	100,00 %	1.308.704.258	100,00 %	1.358.228.991	100,00 %	3.913.160.069	Bagian Organisasi	Bangkalan
		Persentase capaian IKU OPD dengan kategori minimal baik	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang tersusun	11 dokumen	5 dokumen	500.000.000	5 dokumen	510.000.000	5 dokumen	520.000.000	15 dokumen	1.530.000.000	Bagian Organisasi	Bangkalan
		Persentase OPD dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kategori Baik	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	196.226.820	1 dokumen	223.704.258	1 dokumen	238.228.991	3 dokumen	658.160.069	Bagian Organisasi	Bangkalan
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	1 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	110.000.000	2 dokumen	120.000.000	6 dokumen	330.000.000	Bagian Organisasi	Bangkalan
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	1 dokumen	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.000.000	3 laporan	165.000.000	Bagian Organisasi	Bangkalan
Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	410.000.000	1 dokumen	420.000.000	3 dokumen	1.230.000.000	Bagian Organisasi	Bangkalan

	pembangunan di Kabupaten Bangkalan															
PROTOKOL																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi			953.969.200		973.048.584		992.509.554		2.919.527.338	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bangkalan
			4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		77%	953.969.200	78%	973.048.584	80%	992.509.554	80%	2.919.527.338	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bangkalan
			4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan		127 kali	497.699.000	129 kali	507.652.980	131 kali	517.806.039	387 kali	1.523.158.019	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bangkalan
			4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 kali	36.289.150	2kali	37.014.933	3 kali	37.755.231	6 kali	111.059.314	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bangkalan
			4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang tersusun		4 dokumen	419.981.050	4 dokumen	428.380.671	4 dokumen	436.948.284	12 dokumen	1.285.310.005	Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bangkalan
PEMERINTAHAN																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu		90,00 %	2.250.927.582	90,00 %	2.371.859.561	90,00 %	2.270.248.023	90,00 %	6.893.035.166	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bangkalan

	tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan			dan sesuai dengan ketentuan											
			4,01,02,2,01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah		90,00 %	2.250.927.582	100,00 %	2.371.859.561	100,00 %	2.270.248.023	100%	6.893.035.166	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
			4,01,02,2,01,01	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum			0,9	928.007.582	1	974.407.961	1	1.023.128.359	2,9	2925543902	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
					Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan		5 Dok		5 Dok		5 Dok		15 Dok		Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
			4,01,02,2,01,02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				392.548.000		412.175.400		322.893.576		1.127.616.976	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		6 Dok		6 Dok		6 Dok		18 Dok		Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
			4,01,02,2,01,03	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah				930.372.000		985.276.200		924.226.088		2.839.874.288	Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama		6 Dok		6 Dok		6 Dok		18 Dok		Bagian Administrasi Pemerintahan	Bang kalan
KESRA																
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya peran koordinasi dan movev dalam	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHA	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Movev		90%	2.255.432.000	90%	2.892.210.398	90%	3.113.587.329	90%	8.261.229.727	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bang kalan

Bangkalan	merumuskan kebijakan daerah	dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan		TERAAN RAKYAT	Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan											
			4,01,02,2,02	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan		90%	2.255.432.000	90%	2.892.210.398	90%	3.113.587.329	90%	8.261.229.727	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangkalan
			4,01,02,2,02,02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		42 Kali	254.576.000	37 Kali	621.504.000	37 Kali	673.224.420	116 Kali	1.549.304.420	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangkalan
			4,01,02,2,02,01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		18 Kali	1.670.136.000	44 Kali	1.770.143.198	44 Kali	1.911.754.653	106 Kali	5.352.033.851	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangkalan
			4,01,02,2,02,03	Evaluasi, Pelaksanaan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		74 Kali	330.720.000	63 Kali	500.563.200	63 Kali	528.608.256	200 Kali	1.359.891.456	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangkalan
HUKUM																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bangkalan	Sasaran 1 : Meningkatkan peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	90%	90%	1.257.095.382	90%	1.512.521.105	90%	1.609.122.794	90%	4.378.739.281	Bagian Hukum	Bangkalan

	nan di Kabupaten Bangkalan															
			4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100%	1.257.095.382	100%	1.512.521.105	100%	1.609.122.794	100%	4.378.739.281	Bagian Hukum	Bangkalan
			4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				440.960.000		467.417.600		504.811.008		1.413.188.608	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	220.480.000	7 Peraturan Daerah	233.708.800	7 Peraturan Daerah	252.405.504	21 Peraturan Daerah	706.594.304	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	110.240.000	100 Peraturan Bupati	116.854.400	100 Peraturan Bupati	126.202.752	300 Peraturan Bupati	353.297.152	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	200 keputusan Bupati	200 keputusan Bupati	110.240.000	200 keputusan Bupati	116.854.400	200 keputusan Bupati	126.202.752	600 keputusan Bupati	353.297.152	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Kajian Akademis yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	3 Dokumen	331.000.000	Bagian Hukum	Bangkalan
			4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum				385.840.000		558.990.400		591.709.632		1.536.540.032	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya	20 Kasus	20 Kasus	330.720.000	20 Kasus	500.563.200	20 Kasus	528.608.256	60 Kasus	1.359.891.456	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	55.120.000	1 Dokumen	58.427.200	1 Dokumen	63.101.376	3 Dokumen	176.648.576	Bagian Hukum	Bangkalan

			4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			430.295.382		486.113.105		512.602.154		1.429.010.641	Bagian Hukum	Bangkalan	
					Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	36 Kali	36 Kali	165.360.000	36 Kali	175.281.600	36 Kali	189.304.128	108 Kali	529.945.728	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	5 Jenis	5 Jenis	99.575.382	5 Jenis	105.549.905	5 Jenis	113.993.898	15 Jenis	319.119.185	Bagian Hukum	Bangkalan
					Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum	630 Orang	630 Orang	165.360.000	630 Orang	205.281.600	630 Orang	209.304.128	1890 Orang	579.945.728	Bagian Hukum	Bangkalan
PEREKONOMIAN																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Perekonomian	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti (%)		70%	1.150.000.000	75%	1.207.500.000	80%	1.267.875.000	100%	1.331.268.750	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian yang Dilaksanakan		22	700.000.000	22	735.000.000	22	771.750.000	66	810.337.500	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan

			4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang BUMD dan BLUD	11	350.000.000	11	367.500.000,00	11	385.875.000	33	405.168.750	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian	7	150.000.000	7	157.500.000,00	7	165.375.000	21	173.643.750	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ekonomi Mikro Kecil	4	200.000.000	4	210.000.000,00	4	220.500.000	12	231.525.000	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	15	450.000.000	15	472.500.000	15	496.125.000	45	520.931.250	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	7	250.000.000	7	262.500.000,00	7	275.625.000	21	289.406.250	Bagian Perekonomian dan SDA	Bangkalan

			4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertumbuhan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertumbuhan dan Lingkungan Hidup		4	100.000.000	4	105.000.000,00	4	110.250.000	12	115.762.500	Bagian Perencanaan dan SDA	Bangkalan
			4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Energi dan Air		4	100.000.000	4	105.000.000,00	4	110.250.000	12	115.762.500	Bagian Perencanaan dan SDA	Bangkalan
ADBANG																
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev		90%	533.400.000	90%	563.688.000	90%	602.383.040	90%	1.699.471.040	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
			4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100%	533.400.000	100%	563.688.000	100%	602.383.040	100%	1.699.471.040	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
			4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan											Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
					Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rakor PD Lingkup Asisten II		100%	109.200.000	-	-	-	-	100%	109.200.000	Bagian Administrasi Pembangunan	

					Jumlah Laporan Penyusunan Program Pembangunan yang Difasilitasi		-	-	1 Laporan	116.844.000	1 Laporan	126.191.520	2 Laporan	243.035.520	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
			4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan											Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
					Jumlah Laporan Monitoring Kegiatan Fisik Konstruksi		1 Laporan	109.200.000	1 Laporan	116.844.000	1 Laporan	126.191.520	3 Laporan	352.235.520	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
			4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan											Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
					Jumlah Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/Semesteran)		18 Laporan	315.000.000	-	-	-	-	18 Laporan	315.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik		-	-	18 Laporan	330.000.000	18 Laporan	350.000.000	36 Laporan	680.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Bangkalan
BPBJ																
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan pelelangan PBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ		77%	791.000.000	77%	775.259.000	90%	1.550.518.000	90%	3.116.777.000	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab.Bangkalan	Bangkalan

			4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi		77%	791.000.000	77%	775.259.000	90%	1.550.518.000	90%	3.116.777.000	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab.Bang kалан	Bang kалан
			4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi		77%	360.000.000	77%	344.259.000	90%	688.518.000	90%	1.392.777.000	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab.Bang kалан	Bang kалан
			4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Prosentase pengelolaan LPSE yang terfasilitasi		77%	315.500.000	77%	315.500.000	90%	631.000.000	90%	1.262.000.000	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab.Bang kалан	Bang kалан
			4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang difasilitasi		77%	115.500.000	77%	115.500.000	90%	231.000.000	90%	462.000.000	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kab.Bang kалан	Bang kалан

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah pada lima tahun kedepan. Hal ini ditujukan akumulasi pencapaian indikator outcome program kegiatan setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu indikator kinerja Sekretariat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaiannya. Penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Bangkalan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut:

1. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) status LPPD di tahun 2018 sudah mencapai status Sangat Tinggi, di Tahun 2019 dan 2020 Nilainya belum keluar, diharapkan ke depan lebih meningkat peringkatnya;
2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, di tahun 2018 mendapat Nilai B dengan skor 60,10 ,di tahun 2019 mendapat Nilai B dengan skor 61,25 dan di Tahun 2020 Nilainya belum keluar, diharapkan ke depan mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi dan;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan diharapkan lima tahun ke depan meningkat nilainya dan lebih berorientasi kepada perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah:
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Perekonomian
 - c. Bidang Kesra
 - d. Bidang PBJ
 - e. Bidang PembangunanDiharapkan dapat menerbitkan Kebijakan Daerah yang berkualitas.

5. Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah, diharapkan Produk Hukum Daerah yang diundangkan dapat dirasakan oleh masyarakat.
6. Persentase capaian IKU OPD dengan kategori minimal baik, diharapkan Capaian IKU OPD mendapat Kategori minimal baik;
7. Persentase OPD dengan nilai SKM Kategori Baik, diharapkan agar Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Kepuasan Masyarakat berkategori Baik menjadi lebih banyak lagi;
8. Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan, diharapkan Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan meningkat.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD adalah seperti tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Realisasi Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Tujuan :							
	Persentase kasus SARA/politik/ bela Negara yang terselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)		NA	NA	ST	ST	ST	ST
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		B (61,25)	B (63,15)	B (65,25)	B (68,50)	B (70,23)	B (71,23)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan		80,75	83.92	82.50	82.60	82.70	82.70
	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat/ perda yang terselesaikan		60%	65%	70%	80%	85%	
	Indikator Sasaran :							

Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Perekonomian c. Bidang Kesra d. Bidang PBJ e. Bidang Pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%
Persentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	-	-	-	100%	100%	100%
Persentase capaian IKU OPD dengan kategori minimal baik	84.38%	59.38%	86%	88%	90%	90%
Persentase OPD dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kategori Baik	80%	80%	81%	82%	83%	83%
Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	80.50

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah di lingkungan sekretariat daerah kabupaten bangkalan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasikinerja yang akan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangkalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Bangkalan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Jika dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 ini, dapat memberi banyak manfaat didalam meningkatkan kinerja, kami berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel

Hasil Pemetaan
Program/Kegiatan Pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 Terhadap
Pemutahiran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023														
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU (Rp.)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5													
SEKRETARIAT DAERAH	5.01													
	5.01.01.36	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan								4,568,256,350.00	4,179,209,000.00	2,264,094,734.00	2,399,940,418.00	2,569,116,477.00
	01.01.36.01		Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Persentase kebutuhan koordinasi lintas sektor bidang administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	101,000,000.00	107,060,000.00	111,342,400.00	118,022,944.00	127,464,780.00
				Persentase pelaksanaan operasional LPSE	100%	100%	-	-	-	1,600,537,400.00	1,696,569,644.00	-	-	-
			115,730,800	Jumlah peserta pelatihan	60 Orang	60 Orang	-	-	-	288,325,650.00	305,625,189.00	-	-	-
	01.01.36.02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Jenis kebutuhan rumah tangga Pimpinan Daerah yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	30 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	2,578,393,300.00	2,069,954,167.00	2,152,752,334.00	2,281,917,474.00	2,441,651,697.00
	5.01.01.16	Program Pelayanan Kesekretariatan								8,879,393,650.00	7,298,800,001.00	7,660,461,400.00	8,097,952,690.00	8,753,788,905.00
	01.01.16.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana aparatur yg dipelihara	7 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	15 Jenis	25 Jenis	1,671,928,850.00	782,280,000.00	821,394,000.00	870,677,640.00	940,331,851.00
				Jumlah prasarana aparatur yg dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	732,750,000.00	785,506,905.00	824,782,250.00	874,269,185.00	944,210,720.00
	01.01.16.05		Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana aparatur yg diadakan	17 Jenis	20 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	4,104,857,450.00	2,679,656,548.00	2,813,639,375.00	2,982,457,737.00	3,221,054,356.00
				Jumlah prasarana aparatur yg	5 Unit	7 Unit	9 Unit	11 Unit	13 Unit	1,924,857,350.00	2,679,656,548.00	2,813,639,375.00	2,954,321,344.00	3,190,667,051.00

				diadakan										
01.01.16.08		Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran PD yang tersusun	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000.00	106,000,000.00	109,180,000.00	115,730,800.00	124,989,264.00	
			Jumlah dokumen Perencanaan PD yang tersusun	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	295,000,000.00	112,700,000.00	122,706,400.00	142,068,784.00	169,434,287.00	
			Jumlah data dan informasi PD	-	3 Data	3 Data	3 Data	3 Data	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
01.01.16.10		Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/prognosis/akhir tahun	4 Dokumen	-	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	
			Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semester	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
			Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	33,000,000.00	35,120,000.00	38,427,200.00	43,101,376.00	
5.01.5.01.01.30.	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN		Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	78.50%	79.00%	79.50%	80.00%	80.50%	26,068,840,600.00	26,068,840,600.00	13,197,200,333.00	12,536,674,391.00	12,433,976,457.00	
5.01.5.01.01.30.01.		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran							25,550,340,600.00	12,649,145,833.00	11,661,217,166.00	11,529,746,371.00	10,411,712,423.00	
			Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	2,616,931,900.00	2,777,177,991.00	2,916,036,891.00	3,090,999,104.00	3,307,369,041.00	
			Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	22,933,408,700.00	9,871,967,842.00	8,745,180,275.00	8,438,747,267.00	7,104,343,382.00	
			Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah						1,531,453,729.00	1,570,008,670.00	1,632,809,017.00	1,744,816,593.00	1,867,340,210.00	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	25 Kali	28 Kali	31 Kali	34 Kali	37 Kali	64,456,600.00	70,111,713.00	72,916,182.00	77,291,152.00	83,087,989.00	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	160 Kali	160 Kali	400 Kali	400 Kali	400 Kali	1,466,997,129.00	1,499,896,957.00	1,559,892,835.00	1,667,525,441.00	1,784,252,221.00	
			Peningkatan Disiplin Pegawai						518,500,000.00	548,054,500.00	575,457,225.00	604,230,086.00	652,568,493.00	
			Jumlah pakaian Aparatur dan kelengkapan yang diadakan	825 Buah	825 Buah	825 Buah	825 Buah	825 Buah	518,500,000.00	548,054,500.00	575,457,225.00	604,230,086.00	652,568,493.00	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas						458,000,000.00	374,180,000.00	692,889,000.00	712,533,450.00	745,536,126.00	

			Aparatur											
				Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/sosialisasi/seminar	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	458,000,000.00	374,180,000.00	392,889,000.00	412,533,450.00	445,536,126.00
				Fasilitasi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	5.01.5.0 1.01.34.	Program Kelembagaan, Analisa Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta pengembangan Kinerja		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan laporan kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	60%	70%	80%	90%	100%	1,055,600,000.00	1,247,635,200.00	1,246,226,820.00	1,308,704,258.00	1,358,228,991.00
	5.01.5.0 1.01.34. 01.		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan							261,000,000.00	426,659,999.00	437,726,399.00	462,112,721.00	416,281,737.00
				jumlah peraturan ttg anjab dan ABK yg disusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	150,000,000.00	150,000,000.00	160,000,000.00	90,000,000.00
				jumlah dokumen hasil monev kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67,687,250.00	71,748,484.00	74,618,423.00	78,349,346.00	84,617,293.00
				jumlah rancangan perkara tentang perangkat daerah	8 Peraturan	8 Peraturan	8 Peraturan	8 Peraturan	8 Peraturan	62,872,750.00	66,645,115.00	69,310,920.00	72,776,466.00	78,598,583.00
				jumlah peserta sosialisasi	61 Peserta	61 Peserta	61 Peserta	61 Peserta	61 Peserta	84,000,000.00	89,040,000.00	92,601,600.00	97,231,680.00	105,010,214.00
				jumlah kebijakan pedoman kerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46,440,000.00	49,226,400.00	51,195,456.00	53,755,229.00	58,055,647.00
	5.01.5.0 1.01.34. 02.		Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah							365,600,000.00	366,235,201.00	335,570,821.00	350,015,458.00	405,645,087.00
				jumlah dokumen tata naskah dinas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	121,487,000.00	53,776,220.00	-	60,623,632.00	61,873,523.00
				jumlah dokumen penyempurnaan dan pelaporan pelaksanaan SOP daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77,497,500.00	82,147,350.00	144,360,513.00	89,704,906.00	96,881,299.00
				jumlah dokumen monev atas hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	61,382,500.00	65,065,450.00	67,668,068.00	71,051,471.00	76,735,589.00

				jumlah UPP yang mengikuti kompetisi	1 Unit Pelayanan	1 Unit Pelayanan	1 Unit Pelayanan	1 Unit Pelayanan	1 Unit Pelayanan	58,613,000.00	62,129,780.00	64,614,971.00	67,845,720.00	73,273,377.00
				jumlah laporan SPM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	46,620,000.00	49,417,200.00	-	-	-
				jumlah peserta sosialisasi	-	90 Peserta	90 Peserta	90 Peserta	90 Peserta	-	53,699,201.00	58,927,269.00	60,789,729.00	96,881,299.00
5.01.5.0 1.01.34. 03.			Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja							429,000,000.00	454,740,000.00	472,929,600.00	496,576,079.00	536,302,167.00
				jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	275,859,600.00	292,411,176.00	304,107,623.00	319,313,004.00	344,858,045.00
				jumlah dokumen perjanjian kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7,566,000.00	8,019,960.00	8,340,758.00	8,757,796.00	9,458,420.00
				Jumlah Peserta Sosialisasi	83 orang	83 orang	83 orang	83 orang	83 orang	44,974,400.00	47,672,864.00	49,579,779.00	52,058,767.00	56,223,469.00
				jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	100,600,000.00	-	-	-	-
				Jumlah Peserta Monev Reformasi Birokrasi	-	61 peserta	61 peserta	61 peserta	61 peserta	-	106,636,000.00	110,901,440.00	116,446,512.00	125,762,233.00
5.01.5.0 1.01.35.	Program Pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolanan dan kehumasan			Indeks Kepuasan KDH, WKDH Dan Sekretaris Daerah	75%	76%	77%	78%	80%	971,900,000.00	998,414,000.00	1,048,334,757.00	1,100,751,435.00	1,177,804,036.00
5.01.5.0 1.01.35. 01.			Koordinasi Kehumasan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah							125,000,000.00	132,500,000.00	131,250,000.00	146,081,250.00	140,437,500.00
				persentase informasi kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	125,000,000.00	132,500,000.00	131,250,000.00	146,081,250.00	140,437,500.00
5.01.5.0 1.01.35. 02.			Penyebarluasan informasi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah							360,000,000.00	371,000,000.00	389,550,000.00	409,027,500.00	437,659,425.00
				persentase kegiatan pimpinan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	360,000,000.00	371,000,000.00	389,550,000.00	409,027,500.00	437,659,425.00
5.01.5.0 1.01.35. 03.			Koordinasi Keprotokolanan, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah							486,900,000.00	494,914,000.00	519,659,700.00	545,642,685.00	583,837,673.00
Unsur Perdukun g Urusan	5													

Pemerintah														
SEKRETARIAT DAERAH	5.01													
	4.01.02.2,01	Program Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	90%	90%	90%	1,627,426,460.00	1,714,397,783.00	1,834,367,582.00	1,926,085,961.10	2,080,172,838.00
			Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum							1,067,426,460.00	842,897,783.00	928,007,582.00	974,407,961.10	738,488,526.00
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum	5 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	526,426,460.00	622,222,783.00	876,613,694.00	679,467,279.00	551,888,625.00
				Jumlah Kecamatan/desa yang difasilitasi batas Daerah	5 Kecamatan /Desa	5 Kecamatan /Desa	-	5 Kecamatan /Desa	5 Kecamatan /Desa	144,000,000.00	220,675,000.00	-	240,977,100.00	128,319,232.00
				Persentase Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Umum	100%	-	-	-	-	397,000,000.00	-	-	-	-
				Persentase Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	335,000,000.00	494,050,000.00	513,812,000.00	539,502,600.00	418,790,736.00
				Fasilitasi Pelaksanaan Pelantikan KDH dan WKDH	-	-	-	-	1 Keg	-	-	-	-	400,000,000.00
			Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional											
				jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	4 Keg	4 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	650,000,000.00	689,000,000.00	416,560,000.00	445,773,600.00	505,435,488.00
	5,01,01,29	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan		Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	85%	85%	90%	90%	90%	2,025,000,000.00	1,976,900,000.00	2,055,976,000.00	2,157,139,200.00	2,329,690,895.00
	5,01,01,29,1		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial							200,000,000.00	212,000,000.00	220,480,000.00	231,504,000.00	250,024,320.00

			Jumlah Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	40,000,000.00	42,400,000.00	44,096,000.00	46,300,800.00	50,004,784.00
			Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	40,000,000.00	42,400,000.00	44,096,000.00	46,300,800.00	50,004,884.00
			Jumlah Kehadiran Peserta Hotmil Qur'an	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	40,000,000.00	42,400,000.00	44,096,000.00	46,300,800.00	50,004,884.00
			Jumlah Kehadiran Peserta Pengajian Rutin	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	40,000,000.00	42,400,000.00	44,096,000.00	46,300,800.00	50,004,884.00
			Jumlah Peserta Nisfu Sya'ban	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	40,000,000.00	42,400,000.00	44,096,000.00	46,300,800.00	50,004,884.00
			Jumlah Penerima Insentif Takmir Masjid										
5,01,01,29,2		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Agama dan Kebudayaan							1,675,000,000.00	1,605,900,000.00	1,670,136,000.00	1,753,642,800.00	1,893,934,223.00
			Jumlah Peserta MTQ Yang Diseleksi dan Dibina	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	360,650,000.00	382,289,000.00	397,580,560.00	417,459,588.00	450,856,355.00
			Jumlah Peserta Sosialisasi Hibah Bansos	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	37,580,000.00	39,834,800.00	41,428,192.00	43,499,602.00	46,979,570.00
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Di Bulan Ramadhan	100%	100%	100%	100%	100%	119,200,000.00	126,352,000.00	131,406,080.00	137,976,384.00	149,014,495.00
			Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	6 Keg	307,390,000.00	324,915,440.00	337,912,058.00	354,807,660.00	383,192,273.00
			Jumlah Peserta Yang Di Seleksi (POSPEDA)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	29,680,000.00	31,460,800.00	32,719,232.00	34,355,194.00	37,103,609.00
			Jumlah Kegiatan Pelayanan Pelayanan Kebersihan Masjid Agung	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	161,400,000.00	171,084,000.00	177,927,360.00	186,823,728.00	201,769,626.00
			Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Santri Nasional Yang Dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	239,050,000.00	253,393,000.00	263,528,720.00	276,705,156.00	298,841,568.00
			Jumlah Peserta Pemantauan Rukyatul Hilal	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	20,050,000.00	21,253,000.00	22,103,120.00	23,208,276.00	25,064,938.00
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Dzikir dan Sholawat	100%	100%	100%	100%	100%	400,000,000.00	255,317,960.00	265,530,678.00	278,807,212.00	301,111,789.00
5,01,01,29,3		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan							150,000,000.00	159,000,000.00	165,360,000.00	171,992,400.00	185,732,352.00

			Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan											
				Jumlah Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	50,000,000.00	53,000,000.00	55,120,000.00	57,342,800.00	61,910,784.00
				Jumlah Peserta Sosialisasi	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	50,000,000.00	53,000,000.00	55,120,000.00	57,324,800.00	61,910,784.00
				Jumlah Peserta Yang Dibina	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50,000,000.00	53,000,000.00	55,120,000.00	57,324,800.00	61,910,784.00
	5.01.5.0 1.01.30.	Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan pengkajian hukum		Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	85%	85%	90%	90%	90%	1,200,326,000.00	1,272,345,560.00	1,323,239,382.00	1,402,633,745.00	1,514,844,445.00
	5.01.5.0 1.01.30. 01.		Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							400,000,000.00	424,000,000.00	440,960,000.00	467,417,600.00	504,811,008.00
				Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	200,000,000.00	212,000,000.00	220,480,000.00	233,708,800.00	252,405,504.00
				Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	100,000,000.00	106,000,000.00	110,240,000.00	116,854,400.00	126,202,752.00
				Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	200 Keputusan Bupati	200 Keputusan Bupati	200 Keputusan Bupati	200 Keputusan Bupati	200 Keputusan Bupati	100,000,000.00	106,000,000.00	110,240,000.00	116,854,400.00	126,202,752.00
	5.01.5.0 1.01.30. 02.		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum							500,000,000.00	530,000,000.00	551,200,000.00	584,272,000.00	631,013,760.00
				Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	300,000,000.00	318,000,000.00	330,720,000.00	350,563,200.00	378,608,256.00
	5.01.5.0 1.01.30. 03.			Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum	630 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	150,000,000.00	159,000,000.00	165,360,000.00	175,281,600.00	189,304,128.00
				Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	53,000,000.00	55,120,000.00	58,427,200.00	63,101,376.00
			Kegiatan Dokumentasi dan Pengkajian Hukum							300,326,000.00	318,345,560.00	331,079,382.00	350,944,145.00	379,019,677.00

				Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	36 Kali	150,000,000.00	159,000,000.00	165,360,000.00	175,281,600.00	189,304,128.00
				Jumlah Jenis Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	90,326,000.00	95,745,560.00	99,575,382.00	105,549,905.00	113,993,898.00
				Jumlah Kajian Akademis yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000.00	63,600,000.00	66,144,000.00	70,112,640.00	75,721,651.00
	5.01.5.0 1.01.31.	Administrasi, Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah		Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	65%	70%	75%	80%	100%	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00	1,092,000,000.00	1,146,600,000.00	1,238,328,000.00
	5.01.5.0 1.01.31. 01		Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan							200,000,000.00	210,000,000.00	218,400,000.00	229,320,000.00	247,665,600.00
				Jumlah fasilitasi bidang pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	200,000,000.00	210,000,000.00	218,400,000.00	229,320,000.00	247,665,600.00
	5.01.5.0 1.01.31. 02		Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah							500,000,000.00	525,000,000.00	546,000,000.00	573,300,000.00	619,164,000.00
				Jumlah fasilitasi bidang pembinaan dan pengembangan produk daerah yang dilakukan	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	500,000,000.00	525,000,000.00	546,000,000.00	573,300,000.00	619,164,000.00
	5.01.5.0 1.01.31. 03		Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan dan evaluasi bidang penanaman modal dan BUMD							300,000,000.00	315,000,000.00	327,600,000.00	343,980,000.00	371,498,400.00
				Jumlah fasilitasi bidang penanaman modal dan BUMD yang dilakukan	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	300,000,000.00	315,000,000.00	327,600,000.00	343,980,000.00	371,498,400.00

	5.01.5.0 1.01.13. 02	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai		Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi ketentuan di bidang cukai	100%	100%	100%	100%	100%	60,000,000.00	62,700,000.00	64,765,413.00	83,361,333.00	93,231,255.00
			Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai							60,000,000.00	62,700,000.00	64,765,413.00	83,361,333.00	93,231,255.00
				Jumlah perangkat daerah yang dipantau sesuai ketentuan bidang cukai	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	60,000,000.00	62,700,000.00	64,765,413.00	83,361,333.00	93,231,255.00
	5.01.5.0 1.01.32.	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan		Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	85%	85%	90%	90%	90%	544,500,000.00	565,524,000.00	591,700,200.00	636,852,216.00	655,547,256.00
	5.01.5.0 1.01.32. 01		Pengendalian Pembangunan Daerah							200,000,000.00	210,000,000.00	218,400,000.00	233,688,000.00	252,383,040.00
				jumlah laporan monitoring kegiatan fisik konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	105,000,000.00	109,200,000.00	116,844,000.00	126,191,520.00
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rakor PD Lingkup Asisten II	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000.00	105,000,000.00	109,200,000.00	116,844,000.00	126,191,520.00
	5.01.5.0 1.01.32. 02		Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan Daerah							-	344,500,000.00	355,524,000.00	373,300,200.00	403,164,216.00
				Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/ Semesteran)	-	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	-	300,000,000.00	315,000,000.00	330,000,000.00	350,000,000.00
				Laporan Pengawasan Evaluasi Realisasi Anggaran	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	44,500,000.00	40,524,000.00	43,300,200.00	53,164,216.00
	5.01.33	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAA N BARANG DAN JASA		Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ	85%	85%	90%	90%	90%	650,000,000.00	650,000,000.00	689,000,000.00	716,560,000.00	759,553,600.00
	5.01.33. 01		Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa							200,000,000.00	212,000,000.00	220,480,000.00	233,708,800.00	252,405,504.00
				Jumlah aparatur yang mendapat	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	200,000,000.00	212,000,000.00	220,480,000.00	233,708,800.00	252,405,504.00

			Pendidikan dan Pelatihan Formal											
	5.01.33.02		Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa							300,000,000.00	318,000,000.00	330,720,000.00	350,563,200.00	378,608,256.00
			Jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa di Kab. Bangkalan	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang		300,000,000.00	318,000,000.00	330,720,000.00	350,563,200.00	378,608,256.00
	5.01.33.03		Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bagian PBJ							150,000,000.00	159,000,000.00	165,360,000.00	175,281,600.00	189,304,128.00
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%		150,000,000.00	159,000,000.00	165,360,000.00	175,281,600.00	189,304,128.00
TOTAL										47,456,743,435.00	45,869,242,519.00	31,786,666,796.00	32,159,843,806.10	33,549,182,674.00

KEPMEN 050-3708 TAHUN 2020

KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PAGU (Rp.)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
X	NON URUSAN														
4.01	Sekretariat Daerah														
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PERSENTASE TERPENUHI PELAYANAN KESETARIATAN SEKRETARIAT DAERAH			79,5	80,00	80,50			54,120,697,246.00	59,188,789,074.60	64,686,888,290.86
4.01.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										206,051,250.00	226,656,375.00	249,322,012.50
4.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH YANG TERSUSUN			3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	3 DOKUMEN			40,286,900.00	44,315,590.00	48,747,149.00
4.01.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD YANG TERSUSUN			1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN			14,884,200.00	16,372,620.00	18,009,882.00
4.01.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD YANG TERSUSUN			1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN			14,884,200.00	16,372,620.00	18,009,882.00
4.01.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD YANG TERSUSUN			1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN			14,884,200.00	16,372,620.00	18,009,882.00
4.01.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD YANG TERSUSUN			1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN			14,884,200.00	16,372,620.00	18,009,882.00
4.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD YANG TERSUSUN			2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN			51,401,900.00	56,542,090.00	62,196,299.00

4.01.01. 2.01.07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG TERSUSUN JUMLAHBLAPORAN PENGAWASAN EVALUASI RENJA/RKPD			9 DOKUMEN	9 DOKUMEN	9 DOKUMEN			54,825,650.00	60,308,215.00	66,339,036.50
4.01.01. 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										19,711,577,896.00	21,682,735,685.60	23,851,009,254.16
4.01.01. 2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	15,741,323,702	17,490,359,669	19,433,732,966.00	21,377,106,262.60	23,514,816,888.86
4.01.01. 2.02.03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	3,851,550	4,279,500	4,755,000.00	5,230,500.00	5,753,550.00
4.01.01. 2.02.04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi Akuntansi SKPD yang tersusun	4 KALI	4 KALI	4 KALI	4 KALI	4 KALI	168,848,550	187,609,500	208,455,000.00	229,300,500.00	252,230,550.00
4.01.01. 2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	19,807,740	22,008,600	24,454,000.00	26,899,400.00	29,589,340.00
4.01.01. 2.02.07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	12 BULAN	32,546,553	36,162,837	40,180,930.00	44,199,023.00	48,618,925.30
4.01.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan			79.50%	80.00%	80.50%					
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun								163,785,000.00	180,163,500.00	198,179,850.00

				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
				Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			4,755,000.00	5,230,500.00	5,753,550.00
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah			1 kali	1 kali	1 kali			149,520,000.00	164,472,000.00	180,919,200.00
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			4,755,000.00	5,230,500.00	5,753,550.00
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			4,755,000.00	5,230,500.00	5,753,550.00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana								637,533,800.00	701,287,180.00	771,415,898.00
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas			405 Stel	405 Stel	405 Stel			434,695,800.00	478,165,380.00	525,981,918.00

				Beserta Atribut Kelengkapannya										
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50 orang	50 orang	50 orang			202,838,000.00	223,121,800.00	245,433,980.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,502,039,790.00	2,752,243,769.00	3,027,468,145.90
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
				Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			125,772,550.00	138,349,805.00	152,184,785.50
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 jenis	5 jenis	5 jenis			370,939,100.00	408,033,010.00	448,836,311.00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
				Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			472,099,000.00	519,308,900.00	571,239,790.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
				Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis			231,011,400.00	254,112,540.00	279,523,794.00

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			69,540,000.00	76,494,000.00	84,143,400.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430 kali	430 kali	430 kali			1,232,677,740.00	1,355,945,514.00	1,491,540,065.40
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana								2,881,571,875.00	3,169,729,062.50	3,486,701,968.75
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			6 unit	6 unit	6 unit			403,087,300.00	443,396,030.00	487,735,633.00
				Pengadaan Mebel										
				Jumlah Mebel yang diadakan			4 jenis	4 jenis	4 jenis			196,006,200.00	215,606,820.00	237,167,502.00
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan			10 jenis	10 jenis	10 jenis			2,282,478,375.00	2,510,726,212.50	2,761,798,833.75
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,970,304,260.00	8,767,334,686.00	9,644,068,154.60

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			2 jenis	3 jenis	3 jenis			1,654,769,330.00	1,820,246,263.00	2,002,270,889.30
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								1,197,590,000.00	1,317,349,000.00	1,449,083,900.00
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			1 jenis	1 jenis	1 jenis			1,197,590,000.00	1,317,349,000.00	1,449,083,900.00
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1,089,626,800.00	1,198,589,480.00	1,318,448,428.00
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			20 jenis	20 jenis	20 jenis			1,089,626,800.00	1,198,589,480.00	1,318,448,428.00
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi								1,104,201,650.00	1,214,621,815.00	1,336,083,996.50
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			318,948,930.00	350,843,823.00	385,928,205.30

				disediakan										
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis			100,000,000.00	110,000,000.00	121,000,000.00
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	1 kali			85,252,720.00	93,777,992.00	103,155,791.20
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
				Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan			600,000,000.00	660,000,000.00	726,000,000.00
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi								10,327,202,975.00	11,173,487,540.50	12,046,799,216.15
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										
				Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan			10 jenis	10 jenis	10 jenis			4,177,240,525.00	4,594,964,577.50	5,054,461,035.25

				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah											
				Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan			10 jenis	10 jenis	10 jenis			1,103,460,250.00	1,213,806,275.00	1,335,186,902.50	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah											
				Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan			5 jenis	5 jenis	5 jenis			1,307,821,740.00	1,438,603,914.00	1,582,464,305.40	
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Prosentase Perangkat Daerah yang mengumpulkan Laporan Kinerja secara tepat waktu	60%	50.00%	50%	50%	55%	-	-	1,246,226,820.00	1,308,704,258.00	1,358,228,991.00	
				Prosentase Perangkat Daerah dengan Nilai SKM berkategori Baik	80%	80%	81%	82%	83%	626,036,429	488,726,261	2,492,453,640.00	2,617,408,516.00	2,716,457,982.00	
4.01.01.2.13			Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	-	-	100%	100%	100%	626,036,429	488,726,261	1,246,226,820.00	1,308,704,258.00	1,358,228,991.00	
4.01.01.2.13.01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang tersusun	2 dokumen	11 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	-	500,000,000.00	510,000,000.00	520,000,000.00
4.01.01.2.13.02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	196,226,820.00	223,704,258.00	238,228,991.00
4.01.01.2.13.03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	-	100,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00

4.01.01.2.13.04				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	50,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
4.01.01.2.13.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	400,000,000.00	410,000,000.00	420,000,000.00
4.01.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi				78%	80%	1,088,199,023	930,701,098			
4.01.02.2.03			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			77%	78%	80%			953,969,200.00	953,969,200.00	953,969,200.00
4.01.02.2.03.01				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan	100 kali	59 kali	127 kali	129 kali	131 kali			497,699,000.00	497,699,000.00	497,699,000.00
4.01.02.2.03.02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 kali	1 kali	1 kali	2kali	3 kali			36,289,150.00	36,289,150.00	36,289,150.00
4.01.02.2.03.03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen			419,981,050.00	419,981,050.00	419,981,050.00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
4.01	Sekretariat Daerah														
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											5,286,501,076.00	6,267,403,881.70	6,678,516,121.00
4.01.02.2.01			ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN		Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	85%	85%	90%	100%	100%	568,073,894	260,881,377	1,773,973,694.00	1,862,672,378.70	1,955,805,998.00

4.01.02.02.01.01				PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							313,035,457	81,752,750			
					Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	5 dok	5 dok	2 Dok	5 Dokumen	6 Dokumen			867,613,694.00	910,994,378.70	956,544,097.64
4.01.02.02.01.				PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN							66,545,438	41,489,207			
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 kec	5 Kec	3 Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			392,548,000.00	412,175,400.00	432,784,170.00
				FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH							188,492,999	137,639,420			
					Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	100%	100%	100%	6 Dok	6 Dok			513,812,000.00	539,502,600.00	566,477,730.00
4.01.02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitas dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan			90%	90%	90%					
4.01.02.2.02			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan			100%	100%	100%			2,255,432,000.00	2,892,210,398.00	3,113,587,329.00
4.01.02.2.02.02				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			42 Kali	37 Kali	37 Kali			254,576,000.00	621,504,000.00	673,224,420.00
4.01.02.2.02.01				Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			18 Kali	44 Kali	44 Kali			1,670,136,000.00	1,770,143,198.00	1,911,754,653.00
4.01.02.2.02.03				Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan			74 Kali	63 Kali	63 Kali			330,720,000.00	500,563,200.00	528,608,256.00

					Masyarakat										
4.01.02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan		90%	90%	90%						
4.01.02.2.03			Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	100%	100%			1,257,095,382.00	1,512,521,105.00	1,609,122,794.00	
4.01.02.2.03.01				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah								440,960,000.00	467,417,600.00	504,811,008.00	
					Jumlah Peraturan Daerah yang disusun		7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah	7 Peraturan Daerah			220,480,000.00	233,708,800.00	252,405,504.00	
					Jumlah Peraturan Bupati yang disusun		100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati			110,240,000.00	116,854,400.00	126,202,752.00	
					Jumlah Keputusan Bupati yang disusun		200 keputusan Bupati	200 keputusan Bupati	200 keputusan Bupati			110,240,000.00	116,854,400.00	126,202,752.00	
					Jumlah Kajian Akademis yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			100,000,000.00	110,000,000.00	121,000,000.00	
4.01.02.2.03.02				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum								385,840,000.00	558,990,400.00	591,709,632.00	
					Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya		20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus			330,720,000.00	500,563,200.00	528,608,256.00	
					Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			55,120,000.00	58,427,200.00	63,101,376.00	

4.01.02. 2.03.03				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								430,295,382.00	486,113,105.00	512,602,154.00	
				Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan			36 Kali	36 Kali	36 Kali			165,360,000.00	175,281,600.00	189,304,128.00	
				Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis			99,575,382.00	105,549,905.00	113,993,898.00	
				Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum			630 Orang	630 Orang	630 Orang			165,360,000.00	205,281,600.00	209,304,128.00	
4.01.03.		PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										986,700,194.00	1,039,653,194.00	1,102,146,484.00	
4.01.03. 2.01			PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	60%	65%	70%	75%	80%	962,856,647	604,107,150	453,300,000.00	475,965,000.00	499,763,250.00	
4.01.03. 2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang BUMD dan BLUD	11	11	8	8	8	243,320,404.00	142,869,500.00	130,800,000.00	137,340,000.00	144,207,000.00
4.01.03. 2.01.02				Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	13	9	7	7	7	116,224,050.00	54,170,600.00	170,000,000.00	178,500,000.00	187,425,000.00
4.01.03. 2.01.03				Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi mikro kecil	8	4	4	4	4	603,312,193.00	407,067,050.00	152,500,000.00	160,125,000.00	168,131,250.00
4.01.03. 2.04			PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM									-	-	-	

4.01.03. 2.04.01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan			0	7	7			-	-	-
4.01.03. 2.04.02				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pertambangan dan lingkungan hidup			0	3	3			-	-	-
4.01.03. 2.04.03				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang energi dan air			0	3	3			-	-	-
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Persentase koordinasi bidang administrasi pembangunan				100%	100%					
4.01.03. 2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		prosentase pelaksanaan administrasi pembangunan yang difasilitasi				100%	100%			533,400,000.00	563,688,000.00	602,383,040.00
4.01.03. 2.02.01				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah kegiatan Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi	-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan			109,200,000.00	116,844,000.00	126,191,520.00
4.01.03. 2.02.02				Pengendalian dan Evaluasi Program	jumlah laporan monitoring kegiatan fisik konstruksi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			109,200,000.00	116,844,000.00	126,191,520.00
4.01.03. 2.02.03				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan			18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan			315,000,000.00	330,000,000.00	350,000,000.00
4.01.03		Program Perekonomian dan Pembangunan			Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ	99%	98%	77%	90%	90%					
4.01.03. 2.03			Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										791,000,000.00	1,265,500,000.00	1,600,000,000.00

4.01.02. 2.03.01				Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									115,500,000.00	250,000,000.00	350,000,000.00
					Prosentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang difasilitasi			100%	100%	100%	-	-	115,500,000.00	250,000,000.00	350,000,000.00
4.01.02. 2.03.02				Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									315,500,000.00	515,500,000.00	600,000,000.00
					Persentase Pelaksanaan Operasional LPSE	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	315,500,000.00	515,500,000.00	600,000,000.00
4.01.02. 2.03.03				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									360,000,000.00	500,000,000.00	650,000,000.00
					Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi	99%	98%	100%	100%	100%	-	-	360,000,000.00	500,000,000.00	650,000,000.00
TOTAL													59,407,198,495.00	65,456,193,129.30	71,365,404,584.86

